

TESIS

AKIBAT HUKUM AKUISISI PERUSAHAAN PEMEGANG IUP YANG BELUM MENDAPATKAN PERSETUJUAN PEMERINTAH TERHADAP PENGALIHAN DAN PENGENDALIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Digunakan guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar strata dua Magister

Kenotariatan pada Program Pasca Sarjana Universitas Andalas



OLEH:

**DANANG M. ZAWAHIRUL FAHMI, SH
NPM 1620123069**

Dosen Pembimbing I : Dr. Sukanda Husin, SH. LLM

Dosen Pembimbing II : Dr. Rembrant, SH. M.Pd

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2019

**AKIBAT HUKUM AKUISISI PERUSAHAAN PEMEGANG IUP YANG BELUM
MENDAPATKAN PERSETUJUAN PEMERINTAH TERHADAP PENGALIHAN
DAN PENGENDALIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN**

Danang Muhammad Zawahirul Fahmi Program Magister Kenotariatan,
Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang Email:
danangm.zfahmi@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini yaitu 1) untuk mengetahui akibat hukum akuisisi perusahaan pemegang IUP yang belum mendapatkan persetujuan Pemerintah terhadap Peralihan dan Pengendalian Izin Usaha Pertambangan, 2) untuk mengetahui tanggungjawab hukum perusahaan yang mengakuisi perusahaan pemegang IUP. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan hukum yuridis normative. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu tanggungjawab hukum pihak pengakuisisi terhadap pihak terakuisisi sebenarnya tidak mempunyai tanggung jawab hukum apapun, kecuali memang dapat dibuktikan pihak pengakuisisi melakukan itikad yang buruk dalam proses akuisisi maupun setelah akuisisi yang dapat merugikan pihak lain termasuk pihak ketiga sehingga ia dapat dimintakan pertanggungjawaban langsung melalui pengadilan atau cara lainnya. Sedangkan tanggung jawab hukum pihak terakuisisi ia harus melakukan proses administratif kepada instansi terkait yaitu Kementerian ESDM untuk memenuhi ketentuan seperti yang dimaksud dalam Pasal 93 Undang-Undang Minerba. Pihak yang mengakuisi perusahaan pemilik IUP memiliki kewajiban yang sama dengan pihak terakuisi. Peihak pengakuisisi harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang berupa kewajiban-kewajiban yang diwajibkan kepada pemegang IUP, seperti ketentuan Pasal 95 s/d 112 Undang-Undang Minerba.

Kata kunci: hukum, akuisisi, perusahaan, usaha pertambangan

**LEGAL CONSEQUENCES OF ACQUIRING COMPANY OF MINING LICENSE
HOLDER THAT HAS NOT OBTAINED GOVERNMENT APPROVAL
TOWARD MINING LICENSE TRANSFER AND CONTROL**

Danang Muhammad Zawahirul Fahmi^{1*}, Sukanda Husin², Rembrandt³

^{1,2,3}Faculty of Law, Andalas University, Padang - Indonesia * Email:

danangm.zfahmi@gmail.com

Abstract

The objectives of this research are 1) to find out the legal consequences of acquiring company of mining license holder that has not obtained government approval toward mining license transfer and control, 2) to find out the legal liabilities of company that acquires company of mining license holder. This legal research applies the method of normative juridical legal approach. The data analysis technique employs qualitative analysis. The results of this research revealed that the acquirer actually does not have any legal liability to the acquired party unless the acquirer is indeed proven to have committed bad faith during and after the acquisition process which could harm other parties including third parties. Thus, the acquirer can be held directly liable through the court or other ways. Meanwhile, the legal liability of the acquired party is that they must carry out an administrative process to the relevant agencies namely the Ministry of Energy and Mineral Resources, to fulfill the provisions referred to in Article 93 of the Mineral and Coal Law. The party that acquires the company of mining license holder has the same obligation as the acquired party. The acquirer must comply with the provisions in the form of obligations which are required to the mining license holder such as the provisions of Article 95 up to 112 of Mineral and Coal Law.

Keywords: law, acquisition, company, mining business